

ANALISIS KORELASI ANTARA LAJU INFLASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN AKIBAT PHK MASSAL

Nursalamah, Kartika Nurrosidah, Mayla Tania, Julia Rahma Sahara, Suci Hayati

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia

nursalamah516@gmail.com, kartikanurasyidah@gmail.com,

maylatania25@gmail.com, juliarahmahsahara07@gmail.com

sucih867@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the relationship between unemployment rates caused by mass layoffs and inflation rates. The economic crisis has resulted in layoffs and a widening gap between the supply of low-wage job opportunities and the growth of the new workforce. As a result, Indonesia's unemployment rate continues to increase every year. Through a literature review, this study uses a qualitative methodology. Primary and secondary literature sources are collected to conduct the research process. Descriptive qualitative research is a type of this research. Research methods based on descriptive data processing are known as descriptive qualitative research methods. According to the findings of this study, the loss of jobs and income caused by mass layoffs has increased unemployment and poverty rates as affected individuals and families find it difficult to meet their basic needs. An inverse relationship between inflation and unemployment rates is empirically observed without a strong theory; that is, if inflation increases, unemployment decreases, and if inflation decreases, unemployment increases. Thus, the inflation rate and unemployment rates due to mass layoffs have a correlation or relationship that is interrelated and inverse.

Keywords: Correlation, Inflation Rate, Unemployment Rate, Mass Layoffs

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara tingkat pengangguran yang disebabkan oleh PHK massal dan tingkat inflasi. Krisis ekonomi telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta kesenjangan yang semakin lebar antara pasokan peluang kerja upah rendah dan pertumbuhan angkatan kerja baru. Sebagai akibatnya, tingkat pengangguran Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Melalui tinjauan pustaka, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Sumber literatur primer dan sekunder dikumpulkan untuk melakukan proses penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian ini. Metode penelitian yang didasarkan pada pengolahan data deskriptif dikenal sebagai metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut temuan penelitian ini, hilangnya pekerjaan dan pendapatan yang disebabkan oleh PHK massal telah meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan ketika individu dan keluarga yang terkena dampak merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran diamati secara empiris tanpa teori yang kuat; yaitu, jika inflasi meningkat, pengangguran menurun, dan jika inflasi menurun, pengangguran meningkat. Jadi, laju inflasi dan tingkat pengangguran akibat PHK massal memiliki korelasi atau hubungan yang saling berkaitan dan berkebalikan.

Kata Kunci: Korelasi, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran, PHK Massal, Korelasi antara Laju Inflasi dan Tingkat Pengangguran Akibat PHK Massal.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah di Indonesia yang terus memburuk adalah pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 1997 adalah 4,68 persen, jauh di bawah angka normal sebelum krisis ekonomi yaitu kurang dari 5 persen. Angka pengangguran sebesar 4,68 persen masih dianggap normal.

Kesenjangan antara jumlah tenaga kerja baru yang masuk dengan jumlah lowongan kerja masih terus terjadi. Kondisi ini semakin parah dengan adanya krisis ekonomi. Selama krisis ekonomi, PHK terjadi di samping kesenjangan antara jumlah tenaga kerja baru yang masuk dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia yang semakin melebar. Angka pengangguran di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari hal ini.

Berdasarkan penelitian ilmiah, korelasi adalah fakta yang menggambarkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta seberapa dekat hubungannya.¹ Suatu studi yang meneliti kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih disebut korelasi. Menemukan besarnya angka korelasi, yang sering dikenal sebagai koefisien korelasi, memungkinkan seseorang untuk menentukan seberapa dekat hubungan dua variabel atau lebih.²

Hilangnya pekerjaan dan pendapatan akibat PHK massal telah meningkatkan angka kemiskinan karena masyarakat dan keluarga yang terdampak PHK berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat berdampak pada angka kemiskinan; pada tahun 2022, Banten memiliki TPT tertinggi kedua (8,31%) dan Jawa Barat memiliki TPT tertinggi (8,33%). daya beli menurun dan pengangguran meningkat.³

Kenyataannya, inflasi yang relatif tinggi memaksa orang untuk hidup lebih hemat, yang berujung pada banyaknya PHK dan pengurangan produksi, yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya barang di pasaran, yang selanjutnya memperburuk inflasi yang sudah tinggi.

Data tentang tingkat pengangguran dan inflasi dari berbagai negara diteliti oleh Prof. A. W. Phillips dari London School of Economics pada tahun 1958, Inggris. Tanpa landasan teori yang kuat, penelitian empiris mengungkapkan bahwa pengangguran dan inflasi memiliki hubungan terbalik, artinya ketika inflasi meningkat, pengangguran menurun dan sebaliknya.

Lipsey (1997) menggunakan teori pasar tenaga kerja untuk menjelaskan secara teoritis hubungan antara pengangguran dan inflasi. Ia menegaskan bahwa jika pengangguran relatif tinggi, upah tenaga kerja akan sering turun karena pengangguran yang tinggi menunjukkan kelebihan tenaga kerja. Di sisi lain, jika pengangguran rendah, ada kelebihan permintaan untuk pekerja, yang mengakibatkan upah tenaga kerja yang lebih tinggi. Namun, pengangguran tetap ada bahkan dalam situasi di mana penawaran dan

¹ Rudi Haryadi, "Korelasi Antara Matematika Dasar Dengan Fisika Dasar," t.t.

² Ade Marlen Telussa, Elvinus Richard Persulesy, dan Zeth Arthur Leleury, "Penerapan Analisis korelasi Parsial Untuk Menentukan Hubungan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepegawaian Dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku)" 7, no. 1 (2013).

³ Roudatus Solihah, Ali Alamginto, dan Oktavia Theresia Ompu Sunggu, "Implikasi Sosial dan Ekonomi dari PHK Massal," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 3 (1 November 2023): 178–92, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.985>.

permintaan tenaga kerja seimbang untuk menawarkan tingkat upah tertentu. Hal ini karena informasi yang menunjukkan kurangnya keterampilan yang sesuai untuk posisi yang terbuka, di antara faktor-faktor lainnya.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara laju inflasi dan tingkat pengangguran akibat PHK massal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa korelasi antara laju inflasi dan tingkat pengangguran yang terjadi akibat PHK massal. Dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat dasar pemikiran mengenai korelasi antara laju inflasi dan tingkat pengangguran akibat PHK massal.

LANDASAN TEORI

Laju Inflasi

Kenaikan harga yang umum dan terus-menerus disebut inflasi (Ardiansyah, 2017). Menurut Bank Indonesia, kenaikan harga satu atau dua komoditas saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Menurut penelitian para ahli, kenaikan harga dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu dari sisi penawaran, dari sisi permintaan, dan dari pertumbuhan impor barang.

Menurut Santosa (2017) perlu ditekankan bahwa pengertian inflasi meliputi beberapa unsur berikut:

1. *Tendency*, yaitu kecenderungan harga untuk naik, yang berarti bahwa meskipun ada kemungkinan harga turun pada saat tertentu, harga secara umum memiliki kecenderungan untuk naik.
2. *Sustained*, yaitu kenaikan harga yang terjadi secara konsisten dalam jangka waktu panjang, bukan hanya dalam waktu singkat.
3. *General level of price*, yaitu dalam konteks inflasi, harga mengacu pada biaya semua komoditas, bukan hanya satu atau dua kategori.⁵

Jumlah uang yang beredar merupakan penyebab utama inflasi di Indonesia. Karena masih diyakini bahwa uang kuasi hanyalah komponen likuiditas perbankan, jumlah uang yang beredar di Indonesia lebih sering diterjemahkan ke dalam gagasan uang sempit (M1). Komponen kedua adalah defisit anggaran pemerintah, yang memengaruhi permintaan agregat dan terkait erat dengan struktur ekonomi Indonesia (Atmaja, 1999). Pasokan asing dan agregat merupakan faktor ketiga. Adanya kendala struktural di Indonesia merupakan alasan lambatnya faktor pasokan agregat. Salah satu penyebab utama laju inflasi Indonesia adalah biaya pangan. Dalam kebanyakan kasus, terdapat surplus permintaan karena laju pasokan pangan tidak dapat mengimbangi laju permintaan. Akan tetapi, teknologi dan teknik yang masih digunakan kurang maju dan di bawah standar (Atmaja, 1999).⁶

⁴ Agus Wisman Winanto, "Ekonomi Makro Inflasi dan Pengangguran," UNTAR: Universitas Tarumanegara, 2019.

⁵ Febi Mayasari dan Yaqutta Fahra Mahinshapuri, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" 7 (2022).

⁶ Nenry Erawati dan Richard Llewelyn, "Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (t.t.).

Inflasi juga dapat diklasifikasikan menurut apakah inflasi disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang menaikkan biaya komoditas. Dari perspektif asal, inflasi dapat dipisahkan menjadi dua kategori: *Pertama*, inflasi domestik, yang berasal dari dalam negeri. Tekanan dari faktor ekonomi makro di dalam negeri menyebabkan inflasi ini dengan menaikkan biaya barang. Yang *kedua* adalah inflasi yang bersumber dari luar negeri, kadang-kadang dikenal sebagai inflasi impor. Jenis inflasi ini disebabkan oleh efek luar, atau sumber eksternal. Inflasi, atau kenaikan harga, di negara lain yang memiliki hubungan dekat dengan kita mungkin merupakan salah satu cara di mana dampak ini menaikkan biaya barang impor. Indeks harga konsumen akan naik sebagai akibat langsung dari efek ini, dan akan naik secara tidak langsung sebagai akibat dari biaya produksi yang lebih tinggi.⁷

Jenis Inflasi menurut sebabnya yaitu : 1. *Demand-pull inflation*; Ketika produksi telah beroperasi pada tingkat kesempatan kerja penuh atau hampir penuh, peningkatan permintaan agregat merupakan penyebab awal inflasi ini. Ketika harga naik dalam kondisi yang mencegah kesempatan kerja penuh, peningkatan permintaan agregat juga meningkatkan output atau hasil produksi. 2. *Cost-push inflation*; Inflasi akibat dorongan biaya, berbeda dengan inflasi akibat tarikan permintaan, biasanya ditandai dengan penurunan produksi dan kenaikan harga. Jadi, resesi terjadi bersamaan dengan inflasi. Karena biaya produksi yang meningkat, keadaan ini biasanya diawali dengan penurunan total pasokan.

Tiga unsur dari definisi ini menunjukkan bahwa inflasi telah terjadi, khususnya: 1. Kenaikan Harga: Ketika harga suatu barang meningkat, artinya sekarang harganya lebih mahal daripada sebelumnya. 2. Bersifat umum: Ketika harga satu barang naik, harga lain juga naik, itulah sebabnya disebut umum. 3. Terjadi terus-menerus: Jika harga suatu barang hanya naik sesaat, itu tidak dapat dianggap inflasi. Perhitungan inflasi dilakukan minimal selama beberapa bulan. Akan ditentukan apakah kenaikan harga meluas dan berkelanjutan jika terjadi dalam satu bulan.⁸

Pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah untuk menanggulangi dampak inflasi, antara lain:

1. Kebijakan Moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menggunakan instrumen moneternya sendiri. Bank sentral memiliki tiga pilihan untuk kebijakan moneter:
 - a. *Tight Money Policy*
 - b. Menaikkan suku bunga BI rate
 - c. Memperbaiki nilai tukar uang
2. Kebijakan Fiskala
 - a. Menaikkan pajak
 - b. Menekan pengeluaran pemerintah
3. Kebijakan Lainnya

⁷ agus Budi Santosa, "Analisis Inflasi Di Indonesia," t.t.

⁸ Siwi Nur Indriyani, "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015," t.t.

- a. Peningkatan produksi
- b. Kebijakan upah
- c. Pengawasan harga⁹

Inflasi juga memiliki klasifikasi berdasarkan tingkatannya. Menurut (Riyono et al., 2022) klasifikasi inflasi menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Inflasi "ringan" adalah inflasi yang kenaikan harga produk tahunannya kurang dari 10%.
2. Inflasi "sedaang" didefinisikan sebagai kenaikan harga produk antara 10% dan 30% per tahun.
3. Kenaikan harga barang yang berkisar antara 30% hingga 100% per tahun dianggap sebagai inflasi "tinggi".
4. "Hiperinflasi" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan inflasi ketika kenaikan harga produk tahunan melampaui 100%.¹⁰

Dampak inflasi tergantung pada apakah inflasi tersebut dapat diantisipasi secara sempurna atau tidak.

- a. Inflasi yang diantisipasi sempurna

Semua kontrak akan ditetapkan pada tingkat inflasi yang diantisipasi sebesar 5% jika suatu perekonomian mengalami inflasi sebesar 5%. Selain menaikkan biaya penyimpanan uang, yang menurunkan permintaan uang, dan menaikkan biaya makan (inflasi biaya menu), inflasi dalam situasi ini tidak memiliki biaya praktis.

- b. Inflasi yang diantisipasi tidak sempurna

Mayoritas kontrak dalam situasi ini akan dibuat pada nilai nominal. Peminjam akan membayar kembali pinjaman dengan uang yang lebih sedikit (daya beli yang lebih rendah) jika inflasi cukup tinggi meskipun tidak diperkirakan demikian. Sebaliknya, peminjam akan membayar kembali pinjaman dengan jumlah uang yang lebih besar (daya beli yang lebih tinggi) jika inflasi rendah meskipun tidak diantisipasi demikian.¹¹

Tingkat inflasi adalah evolusi kenaikan harga dari waktu ke waktu untuk berbagai barang dan jasa secara umum. Biasanya, tingkat inflasi ditunjukkan dalam persentase (%). Ada empat tahap inflasi: ringan, sedang, parah, dan hiperinflasi.

Wikipedia menyatakan bahwa kenaikan harga di bawah 10% dianggap inflasi ringan, kenaikan antara 10% dan 30% dianggap inflasi sedang, kenaikan antara 30% dan 100% per tahun dianggap inflasi parah, dan kenaikan harga yang melebihi 100% per tahun dianggap hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali. Namun, tidak ada patokan yang seragam, dan angka inflasi ini biasanya relatif. Misalnya, meskipun tingkat inflasi Indonesia lebih tinggi

⁹ Dody Apriliawan dan Hasbi Yasin, "Pemodelan Laju Inflasi Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel," t.t.

¹⁰ M Hafidz Meiditambua Saefulloh dan Muhammad Rizah Fahlevi, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia" 3, no. 1 (2023).

¹¹ Arko Pujadi, "Inflasi: Teori Dan Kebijakan" 2, no. 2 (2022).

daripada negara-negara lain di kawasan tersebut, namun masih dianggap cukup wajar asalkan tetap dalam satu digit, seperti 6–7%. Sebaliknya, negara-negara kaya memiliki tingkat inflasi antara 2 dan 3%. Di sisi lain, tingkat inflasi juga bisa negatif, yang dikenal sebagai deflasi dan menunjukkan bahwa harga keseluruhan untuk barang dan jasa dalam suatu ekonomi telah menurun dari waktu ke waktu.¹²

Tingkat Pengangguran

Menurut Sukirno (2010), pengangguran terjadi ketika seseorang yang dianggap sebagai tenaga kerja secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi tidak berhasil memperoleh posisi yang diinginkannya. Banyak pekerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan karena perkembangan kesempatan kerja lebih lambat daripada perluasan tenaga kerja.¹³

Orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau memulai usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja, dianggap sebagai pengangguran (BPS: 2010).¹⁴

Sukirno (1994) mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja (usia 15–64 tahun) ingin memperoleh pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya. Orang yang ingin bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan disebut sebagai penganggur.

Seseorang yang bekerja dan ingin mencari pekerjaan tetapi tidak dapat melakukannya dianggap menganggur (Mahdar, 2015). Selain itu, menurut Mahdan (2015), seseorang yang bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi tidak mendapatkan posisi yang diinginkan dianggap menganggur.¹⁵

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangguran normal adalah Seseorang yang mencari pekerjaan pada tingkat gaji tertentu tetapi gagal mendapatkan posisi yang diinginkannya.
- b. Pengangguran struktural terjadi ketika upah minimum lebih tinggi daripada harga di mana penawaran dan permintaan tenaga kerja seimbang.
- c. Pengangguran konjungtur, Biasanya jenis pengangguran ini disebut sebagai pengangguran sukarela. Karena mereka adalah karyawan yang tidak ingin bekerja dengan upah di bawah upah sebenarnya, maka pengangguran ini disebut sebagai pengangguran sukarela. Mereka hanya ingin bekerja jika upahnya sama atau lebih besar dari upah sebenarnya.¹⁶

¹² Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2009).

¹³ Imarotus Suaidah dan Hendry Cahyono, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang,” t.t.

¹⁴ Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,” t.t.

¹⁵ Basrowi dkk., “PENGANGGURAN (Perspektif Teoretis),” 2018.

¹⁶ Suaidah dan Cahyono, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang.”

Macam-macam pengangguran berdasarkan ciri-cirinya terbagi menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

- a. Sukirno (2010:328) mendefinisikan pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang sudah lama tidak mempunyai pekerjaan, berminat untuk bekerja, dan sedang aktif mencari pekerjaan.
- b. Keadaan yang disebut dengan pengangguran tersembunyi terjadi apabila tenaga kerja melakukan kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang dibutuhkan (Sukirno, 2010).
- c. Pengangguran yang terjadi pada periode tertentu dalam setahun dikenal sebagai pengangguran musiman.
- d. Pekerja yang bekerja dalam jumlah jam lebih sedikit dari biasanya dikatakan pengangguran setengah menganggur¹⁷

Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang terus meningkat. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, angka pengangguran di Indonesia secara umum berada di bawah 5 persen dan pada tahun 1997 mencapai 4,68 persen. Angka pengangguran sebesar 4,68 persen masih merupakan pengangguran dalam skala yang wajar.

Kesenjangan antara jumlah tenaga kerja baru yang masuk dengan jumlah lowongan kerja masih terus terjadi. Kondisi ini semakin parah dengan adanya krisis ekonomi. Selama krisis ekonomi, PHK terjadi di samping kesenjangan antara jumlah tenaga kerja baru yang masuk dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia yang semakin melebar. Angka pengangguran di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari hal ini.¹⁸

PHK Massal

Baik ekonomi maupun masyarakat terdampak signifikan oleh PHK massal. Pengangguran meningkat akibat PHK massal. Mencari pekerjaan baru sulit bagi banyak orang yang kehilangan pekerjaan tanpa sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Hal ini memperburuk pengangguran dan kondisi pasar tenaga kerja. PHK massal juga dapat menurunkan pengeluaran dan aktivitas ekonomi. Banyak orang yang menganggur tidak mampu membeli produk dan layanan, yang akan menurunkan permintaan dan memperlambat aktivitas ekonomi. PHK massal juga dapat merugikan bisnis yang memproduksinya. Selain kehilangan orang dan sumber daya penting, citra perusahaan pun rusak. Semua hal dipertimbangkan, PHK massal berdampak buruk pada banyak aspek ekonomi dan masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif, bisnis harus berhati-hati saat melakukan PHK dan mempertimbangkan opsi lain seperti pemotongan jam kerja atau kompensasi.¹⁹

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pemutusan

¹⁷ Suaidah dan Cahyono.

¹⁸ Rosalendro Eddy Nugroho, "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014," no. 2 (t.t.).

¹⁹ Mohd Amiruddin Saddam, "Analisis Sentimen Fenomena PHK Massal Menggunakan Naive Bayes dan Support Vector Machine," *Jurnal Informatika*, 2023.

hubungan kerja karena sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan berakhirnya semua hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan/pemberi kerja. PHK umumnya disebabkan oleh pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, atau pemecatan perusahaan. PHK didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja karena sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan PHK massal adalah pemutusan hubungan kerja terhadap banyak pekerja karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya, misalnya dengan menutup pabrik, cabang, atau unit tertentu sebagai bagian dari proses rasionalisasi. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga semester I tahun 2023, sejumlah besar pekerja telah menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagaimana dilansir berbagai media publik. Menurut angka tersebut, sebanyak 26.400 pekerja telah kehilangan pekerjaan. Tiga daerah dengan tingkat PHK tertinggi pada semester pertama tahun ini adalah Jawa Tengah (4.787), Banten (5.141), dan Jawa Barat (11.595).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kesulitan pendanaan, dan ketidakmampuan sejumlah organisasi untuk terus beroperasi. Akibatnya, banyak perusahaan dalam negeri yang memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, penurunan produksi perusahaan menjadi penyebab utama terjadinya PHK massal ini, yang memaksa perusahaan mengurangi jumlah karyawannya demi menjaga stabilitas bisnis yang dibiayai investor.²⁰

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang biasa disebut dengan singkatan PHK merupakan kejadian yang sering terjadi dengan berbagai macam penyebabnya. Pekerja yang terkena dampak dari fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengalami dampak psikologis, sosial, dan finansial yang besar. Pemberian pesangon merupakan salah satu tata cara dan pedoman yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka memberikan kompensasi kepada pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pesangon berfungsi sebagai kompensasi dalam bentuk uang dan sebagai bentuk pengakuan perusahaan atas kontribusi dan rasa terima kasih para pekerjanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang pemutusan hubungan kerja yang berlaku bagi semua perusahaan komersial, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Baik perusahaan milik swasta maupun milik negara, maupun perusahaan perseorangan, termasuk perusahaan sosial dan perusahaan lainnya yang memiliki pengurus dan karyawan yang menerima gaji bulanan dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu, pekerja yang terkena dampak PHK harus mengupayakan pemberian pesangon atau bentuk remunerasi lainnya yang dapat mendukung karier dan produktivitasnya di masa mendatang.²¹

²⁰ Roudatus Solihah dan Ali Alamginto, "Implikasi Sosial dan Ekonomi dari PHK Massal," t.t.

²¹ Ayza Rachma Zahranisza dkk., "Jaminan Pemberian Pesangon Terhadap Karyawan Yang Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Studi Kasus PHK Massal Shopee Indonesia Tahun 2023," 7 Juni 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11520005>.

Alasan-alasan berikut dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan Pasal 61 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1. Meninggalnya pekerja, berakhirnya jangka waktu perjanjian, putusan pengadilan, atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama, semuanya dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja.
2. Kematian pemilik bisnis atau pengalihan hak atas bisnis melalui penjualan, warisan, atau hadiah tidak dapat mengakhiri kontrak kerja.
3. Kecuali jika perjanjian pengalihan memuat klausula lain yang menurunkan hak-hak pekerja atau buruh, maka pemberi kerja baru memikul tanggung jawab atas hak-hak pekerja atau buruh ketika terjadi pengalihan perusahaan.
4. Setelah berunding dengan pekerja atau buruh, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri kontrak kerja jika pengusaha meninggal dunia.
5. Ketika pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli warisnya berhak mendapatkan hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hak-hak yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan.²²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang ada. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikategorikan menggunakan rumus penelitian (Darmalaksana, 2020a). Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan/atau kutipan referensi untuk menyajikan temuan penelitian, mengabstraksikan data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, dan menganalisis data untuk memberikan pengetahuan untuk inferensi.²³

Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif berbasis pengolahan data dikenal dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (Djam'an Satori, 2011: 23).²⁴ Hasil penelitian kualitatif dinyatakan sebagai deskripsi kalimat yang bermakna yang memperjelas pemahaman tertentu.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai korelasi antara laju inflasi dan tingkat pengangguran akibat PHK yang terjadi secara massal.

Sumber Data

²² bahitatul Baihaki, "Dampak Covid-19 Terhadap Phk Massal Di Indonesia," T.T.

²³ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," UIN Sunan Gunung Djati Bandung, t.t.

²⁴ Siti Hanyfah, Gilang Ryan Fernandes, dan Iwan Budiarto, "Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash," 2022.

²⁵ Sonny Leksono, *Ilmu Ekonomi dan Penelitian Kualitatif* (Jakarta, 2013).

Buku, jurnal, publikasi ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas analisis korelasi antara laju inflasi dan tingkat pengangguran sebagai akibat dari PHK massal merupakan sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Karya yang membahas laju inflasi, tingkat pengangguran, PHK massal, hubungan antara inflasi dan pengangguran, dan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran sebagai akibat dari PHK massal merupakan beberapa sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi Pustaka. Untuk mengetahui hubungan antara laju inflasi dan tingkat pengangguran akibat PHK massal, peneliti mengumpulkan bahan-bahan tersebut.

Teknik Analisis Data

Untuk memahami dan membandingkan laju inflasi dan tingkat pengangguran akibat PHK massal, data dipelajari menggunakan analisis isi, yang melibatkan pengklasifikasian dan evaluasi informasi dari literatur. Untuk mencapai hal ini, temuan penting mengenai hubungan antara laju inflasi dan tingkat pengangguran akibat PHK massal dihimpun.

Validitas dan Reliabilitas

Peneliti menggunakan sumber data yang kredibel, termasuk buku teks, publikasi ilmiah, dan jurnal ilmiah dengan reputasi yang solid dalam ekonomi konvensional dan Islam, untuk menjamin keaslian dan keandalan studi ini. Selain itu, dengan membandingkan hasil dari beberapa sumber terkait, peneliti melakukan triangulasi sumber mereka.²⁶

HASIL DAN KESIMPULAN

Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Pengangguran dan inflasi merupakan masalah sementara yang dihadapi perekonomian. Definisi inflasi adalah kenaikan harga yang luas dan berkelanjutan. Kecuali jika kenaikan tersebut menyebar (menaikkan harga) ke komoditas lain, kenaikan satu atau dua barang saja tidak dapat dianggap inflasi. Inflasi merupakan masalah yang dihadapi setiap negara di dunia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi suatu negara dapat menjadi tolok ukur seberapa baik atau buruk perekonomiannya.²⁷

Bergantung pada tingkat inflasi, pengangguran dapat dipengaruhi oleh inflasi secara positif dan negatif. Inflasi yang rendah dapat menguntungkan perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong investasi, yang semuanya dapat menurunkan tingkat pengangguran Indonesia. Di sisi lain, peningkatan inflasi yang besar dapat berdampak negatif pada perekonomian, meningkatkan anggaran untuk produksi, menurunkan investasi, menurunkan daya beli mereka yang berpenghasilan tetap, seperti ASN, pekerja swasta, atau buruh, dan meningkatkan tingkat pengangguran Indonesia. Produsen juga dapat memperoleh keuntungan dari inflasi jika pendapatan mereka melebihi kenaikan biaya

²⁶ Muhammad Wahyu Ilhami Wiyanda Vera Nurfajriani, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," 30 September 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

²⁷ "Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia," *Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN*, t.t.

produksi. Namun, produsen mungkin menderita kerugian yang memaksa mereka untuk menurunkan output dan memberhentikan karyawan jika inflasi menaikkan biaya produksi secara signifikan.²⁸

Secara teoritis, dalam periode inflasi yang relatif tinggi, para pengangguran akan mendapatkan banyak pekerjaan karena, selain fakta bahwa banyak orang membutuhkan energi mereka, para produsen harus memanfaatkan momentum yang tercipta oleh kenaikan harga barang dengan meningkatkan produksi mereka, yang secara alami mengharuskan pembukaan kapasitas produksi baru, yang pada gilirannya membutuhkan perekrutan lebih banyak pekerja untuk mencapai kesempatan kerja penuh.

Profesor A. W. Phillips dari London School of Economics di Inggris (1958) meneliti data tentang inflasi dan tingkat pengangguran dari sejumlah negara. Bukti hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran yaitu, jika inflasi naik, pengangguran berkurang, dan sebaliknya, ditetapkan secara empiris tanpa landasan teoritis yang kuat.

Lipsey (1997) menggunakan teori pasar tenaga kerja untuk menjelaskan secara teoritis hubungan antara pengangguran dan tingkat inflasi. Ia menegaskan bahwa jika pengangguran relatif tinggi, upah tenaga kerja akan sering menurun karena tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan kelebihan tenaga kerja. Di sisi lain, karena ada permintaan yang lebih besar untuk pekerja ketika tingkat pengangguran rendah, upah tenaga kerja meningkat. Namun, pengangguran tetap ada bahkan dalam situasi di mana penawaran dan permintaan tenaga kerja seimbang untuk menawarkan tingkat upah tertentu. Hal ini karena informasi yang menunjukkan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan posisi yang terbuka, di antara faktor-faktor lainnya. Menurut Lipsey, penawaran dan permintaan menentukan tingkat upah sehubungan dengan teori Phillips, dan variasi dalam tingkat upah bergantung pada permintaan surplus untuk tenaga kerja. Akibatnya, tingkat upah akan naik sebanding dengan permintaan ekstra untuk tenaga kerja, yang menghasilkan tingkat pengangguran yang lebih rendah atau lebih kecil. Sebagai hasil dari proporsionalitas antara peningkatan upah dan permintaan berlebih untuk tenaga kerja, pengangguran rendah ketika tingkat upah tinggi dan tinggi ketika tingkat upah rendah. Sebaliknya, jika frasa tersebut dibalik, bunyinya sebagai berikut: pengangguran tinggi mengakibatkan upah rendah, sedangkan pengangguran rendah mengakibatkan pendapatan tinggi. Perlu disebutkan bahwa premis mendasar dari teori ini adalah bahwa upah riil, yang dihitung dengan membagi upah nominal dengan harga berlaku, sama dengan upah nominal.²⁹

Korelasi Antara Laju Inflasi dan Tingkat Pengangguran Akibat PHK Massal

Berdasarkan penelitian ilmiah, korelasi adalah fakta yang menggambarkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta seberapa dekat hubungannya.³⁰ Suatu studi yang meneliti kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih disebut korelasi. Menemukan besarnya angka korelasi, yang sering dikenal sebagai koefisien korelasi,

²⁸ Mochamad Guntur dkk., “Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Pada Bulan Februari Periode 2021-2024,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)* 7, no. 1 (30 Juni 2024): 70, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1305>.

²⁹ Winanto, “Ekonomi Makro Inflasi Dan Pengangguran.”

³⁰ haryadi, “Korelasi Antara Matematika Dasar Dengan Fisika Dasar.”

memungkinkan seseorang untuk menentukan seberapa dekat hubungan dua variabel atau lebih.³¹

Hilangnya pekerjaan dan pendapatan akibat PHK massal telah meningkatkan angka kemiskinan karena masyarakat dan keluarga yang terdampak PHK berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat berdampak pada angka kemiskinan; pada tahun 2022, Banten memiliki TPT tertinggi kedua (8,31%) dan Jawa Barat memiliki TPT tertinggi (8,33%). Daya beli menurun dan pengangguran meningkat.³²

Kenyataannya, inflasi yang relatif tinggi memaksa orang untuk hidup lebih hemat, yang berujung pada banyaknya PHK dan penurunan produksi, yang menciptakan kelangkaan komoditas di pasar dan semakin meningkatkan inflasi yang sudah tinggi.

Profesor A. W. Phillips dari London School of Economics di Inggris (1958) meneliti data inflasi dan tingkat pengangguran dari sejumlah negara. Tanpa memiliki landasan teori yang kuat, penelitian empiris mengungkapkan bahwa pengangguran dan inflasi memiliki hubungan terbalik: jika inflasi meningkat, pengangguran menurun, dan jika inflasi menurun, pengangguran meningkat.

Lipsey (1997) menggunakan teori pasar tenaga kerja untuk menjelaskan secara teoritis hubungan antara pengangguran dan tingkat inflasi. Ia menegaskan bahwa jika pengangguran relatif tinggi, upah tenaga kerja akan sering menurun karena tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan kelebihan tenaga kerja. Di sisi lain, karena ada permintaan yang lebih besar untuk pekerja ketika tingkat pengangguran rendah, upah tenaga kerja meningkat. Namun, pengangguran tetap ada bahkan dalam situasi di mana penawaran dan permintaan tenaga kerja seimbang untuk menawarkan tingkat upah tertentu. Hal ini karena informasi yang menunjukkan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan posisi yang terbuka, di antara faktor-faktor lainnya. Menurut Lipsey, penawaran dan permintaan menentukan tingkat upah sehubungan dengan teori Phillips, dan variasi dalam tingkat upah bergantung pada permintaan surplus untuk tenaga kerja. Akibatnya, tingkat upah akan naik sebanding dengan permintaan ekstra untuk tenaga kerja, yang menghasilkan tingkat pengangguran yang lebih rendah atau lebih kecil. Sebagai hasil dari proporsionalitas antara peningkatan upah dan permintaan berlebih untuk tenaga kerja, pengangguran rendah ketika tingkat upah tinggi dan tinggi ketika tingkat upah rendah. Sebaliknya, jika frasa tersebut dibalik, bunyinya sebagai berikut: pengangguran tinggi mengakibatkan upah rendah, sedangkan pengangguran rendah mengakibatkan pendapatan tinggi. Perlu disebutkan bahwa premis mendasar dari teori ini adalah bahwa upah riil, yang dihitung dengan membagi upah nominal dengan harga berlaku, sama dengan upah nominal.³³

³¹ Telussa, Persulesy, dan Leleury, "Penerapan Analisis Korelasi Parsial Untuk Menentukan Hubungan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepegawaian Dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku)."

³² Roudatus Solihah, Ali Alamginto, dan Oktavia Theresia Ompu Sunggu, "Implikasi Sosial dan Ekonomi dari PHK Massal."

³³ Winanto, "Ekonomi Makro Inflasi Dan Pengangguran."

KESIMPULAN

Menurut penelitian ini, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi berkorelasi terbalik, terutama ketika PHK massal terjadi. Ini berarti bahwa tingkat pengangguran sering menurun sementara inflasi meningkat dan sebaliknya. Teori ekonomi seperti teori pasar tenaga kerja Lipsey dan Kurva Phillips memberikan penjelasan untuk korelasi ini. Pengangguran dan kemiskinan meningkat sebagai akibat dari PHK massal, yang sering terjadi sebagai akibat dari ketidakstabilan perusahaan dan krisis ekonomi. Namun, inflasi yang berlebihan dapat memperburuk kondisi ini dengan menurunkan daya beli dan menghambat belanja publik. Oleh karena itu, mengurangi dampak buruk PHK besar-besaran terhadap perekonomian memerlukan pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis Keberadaan Tradeoff Inflasi Dan Pengangguran (Kurva Phillips) Di Indonesia.” *Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN*, t.t.
- Apriliawan, Dody, dan Hasbi Yasin. “Pemodelan Laju Inflasi Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel,” t.t.
- Baihaki, Bahitatul. “Dampak Covid-19 Terhadap Phk Massal Di Indonesia,” t.t.
- Basrowi, Sindi Yuliana, Arief Dian Prayogo, Juwita Ester Liana, M. Andriansyah, dan I Komang Astridinata. (2018.) “Pengangguran (Perspektif Teoretis),” .
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan.” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, t.t.
- Erawati, Neny, dan Richard Llewelyn. “Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia.” *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (t.t.).
- Guntur, Mochamad, Muhammad Fikri Yusuf, Nadila Berlian Agustina, Luria Zahra, dan Arif Fadilla. (2024)“Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Pada Bulan Februari Periode 2021-2024.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)* 7, no. 1 : 70. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1305>.
- Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, dan Iwan Budiarto. (2022). “Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash,”.
- Haryadi, Rudi. “Korelasi Antara Matematika Dasar Dengan Fisika Dasar,” t.t.
- Indriyani, Siwi Nur. “Analisis Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2005 – 2015,” t.t.
- Leksono, Sonny. (2013) *Ilmu Ekonomi dan Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- Mayasari, Febi, dan Yaqutta Fahra Mahinshapuri. 2022)“Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” 7.

- Nugroho, Rosalendro Eddy. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014,” no. 2 (t.t.).
- Pujadi, Arko. (2022). “Inflasi: Teori Dan Kebijakan” 2, no. 2.
- Roudatus Solihah, Ali Alamginto, dan Oktavia Theresia Ompu Sunggu. (2023) “Implikasi Sosial dan Ekonomi dari PHK Massal.” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 3 : 178–92. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.985>.
- Saddam, Mohd Amiruddin. 2023) “Analisis Sentimen Fenomena PHK Massal Menggunakan Naive Bayes dan Support Vector Machine.” *Jurnal Informatika*.
- Saefulloh, M Hafidz Meiditambua, dan Muhammad Rizah Fahlevi. (2023) “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia” 3, no. 1 .
- Santosa, Agus Budi. “Analisis Inflasi Di Indonesia,” t.t.
- Solihah, Roudatus, dan Ali Alamginto. “Implikasi Sosial dan Ekonomi dari PHK Massal,” t.t.
- Suaidah, Imarotus, dan Hendry Cahyono. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang,” t.t.
- Suseno, dan Siti Astiyah. (2009) *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Telussa, Ade Marlen, Elvinus Richard Persulesy, dan Zeth Arthur Leleury. (2013) “Penerapan Analisis Korelasi Parsial Untuk Menentukan Hubungan Pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepegawaian Dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku)” 7, no. 1).
- Winanto, Agus Wisman. (2019) “Ekonomi Makro Inflasi Dan Pengangguran.” *UNTAR: Universitas Tarumanegara*.
- Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami. (2024) “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,”. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.
- Yacoub, Yarlina. “Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,” t.t.
- Zahranisza, Ayyza Rachma, Regita Fakhira, Zahra Awaliany Safitri, dan Amanda Maharani Fachri. (2024) “Jaminan Pemberian Pesangon Terhadap Karyawan Yang Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Studi Kasus PHK Massal Shopee Indonesia Tahun 2023,” . <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11520005>.